

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di dapatkan serta diolah dan dianalisis kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi kumulatif terhadap korporasi selalu menerapkan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana korporasi. Penerapan sanksi kumulatif dengan terdakwa korporasi diterapkan terhadap korporasi dan pengurus korporasi. Hal itu dikarenakan pidana penjara tidak dapat diterapkan terhadap korporasi sehingga pengurus korporasi mendapatkan sanksi pidana penjara. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda kepada korporasi dan pidana penjara terhadap pengurus korporasi dikarenakan hakim terikat untuk menjatuhkan ancaman kumulatif terhadap tindak pidana korporasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi kumulatif terhadap korporasi harus berani membuat terobosan hukum dalam menerapkan sanksi yang dirumuskan secara kumulatif guna memenuhi tujuan pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ICJR, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister
- Cempaka Indah, 2014, *Analisa Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi*, UIN Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penintensir Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang
- Kristian, 2018, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Hatta, 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Muladi Dwidja Pryatno, 2011, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- , 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, LBH Indonesia*, Jakarta
- , 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Ruslah Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Penerbit Kencana, Jakarta,

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan	Pengadilan	Negeri	Banyuwangi	Nomor
410/Pid.B/2012/PN.BWI				

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 133/Pid.B/2013/PN.MBO

Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia	Nomor
K/PID.SUS/2013					1405

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Pwk

D. Jurnal

Mompang L. Panggabean, 2017, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Edisi 12-Maret 2017, LeIP

Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017

E. Internet

Ahmad drajad, *Penerapan sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai subjek pidana korupsi*, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101

Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_pol_huk&pemidanaan.pdf

F. Sumber-Sumber lain

*Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP),
Panitia Kerja R-KUHP DPR RI(24 Februari 2017)*

